



# RENCANA KERJA

**DINAS PERHUBUNGAN**

**2025**

- ☎ 021-29230770
- ✉ [dishub@depok.go.id](mailto:dishub@depok.go.id)
- 📍 Jl. Perhubungan No 50 Jatimulya Cilodong

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor transportasi merupakan urat nadi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, terutama dalam kegiatan perekonomian. Suatu daerah mustahil dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik jika tidak didukung oleh transportasi yang baik. Depok merupakan sebuah kota yang memiliki posisi yang sangat strategis berada di poros Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Dari posisi ini menjadikan Depok sebagai kota yang menarik untuk berinvestasi dan bermukim yang menyebabkan dampak lain yang ditimbulkan yaitu masalah transportasi antara lain kemacetan lalu lintas.

Dinas Perhubungan Kota Depok memiliki peran strategis dalam bidang transportasi dan harus mampu meningkatkan kelancaran dan keselamatan transportasi dalam rangka menciptakan transportasi Kota Depok yang mengikuti kebutuhan masyarakat dan nyaman sebagai implementasi visi Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera. Transportasi tidak dapat dilihat secara parcial atau sektoral semata dalam perencanaan dan penanganannya. Sebagaimana transportasi yang menghubungkan satu sama lain, maka urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam urusan perencanaannya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan sangat berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok yang ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangk

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 – 2026 yang berisikan Visi, Misi, Kebijakan, dan Program Kepala Daerah terpilih untuk lima tahun kedepan. RPJMD merupakan pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) OPD. Rencana Kerja Dinas Perhubungan dalam proses penyusunannya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Dinas Perhubungan Kota Depok. Selain itu juga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan evaluasi renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar pedoman yaitu :

1. Undang – undang nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang- undang No. 17 th 2007 tentang RPJPN tahun 2005 – 2025;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124

9. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Teknis Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Perhubungan;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012 - 2032
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2020 tentang Retribusi Bidang Perhubungan
16. Peraturan Daerah Kota Depok No 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 yaitu :

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok ke dalam rencana kerja yang akan ditempuh selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Depok dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 adalah :

- a. Agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok dapat terarah dan berhasil dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
- b. Agar kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok selama kurun waktu tahun 2025 dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.3 Isu – Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III : TUJUAN ,SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DISHUB**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V : PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023, Capaian Tahun 2024 s.d. Triwulan I dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan**

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2023 bertujuan untuk mengidentifikasi capaian Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi sehingga bisa dijadikan bahan masukan di penyusunan renja selanjutnya.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) program yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

***Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perhubungan***

- Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2023 sebesar Rp. 86.568.886.238 dengan realisasi Rp.80.602.282.997 **Capaian 93,11%**

***Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan***

- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan target Rp. 2.137.240.000, realisasi Rp. 1.017.435.000 (95,21%) **Capaian 97 %**
- Retribusi Terminal dengan target Rp. 588.640.000,realisasi Rp.529.716.500 (89,99%)
- Retribusi Tempat khusus parkir dengan target Rp 320.800.000, realisasi Rp.363.693.000 (113,37%)

Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) Program dengan 18 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan alokasi anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp 85.781.952.989 dengan realisasi pada tw 1 Rp 16.369.136.797 yang artinya capaian keuangan mencapai 19.08% dan fisik kinerja sebesar 23.44%.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2024 secara umum telah memenuhi harapan. Pelaksanaan dan capaian dari rencana kerja Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)**

kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-3)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2023 (N-2)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024 (N-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							TARGET		REALISASI		CAPAIAN				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
			kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	136,312,665,300.00	100.00%	19,534,217,379.00	100.00%	22,113,524,800.00	98.53%	19,651,834,884.00	98.53%	89%	100.00%	26,204,029,639	25%	5,986,471,431	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	828,468,600.00	100%	85,619,500.00	100%	124,286,300.00	100%	117,424,100	100%	94%	100%	149,599,100	25%	96,103,000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 dokumen	286,772,600.00	4 Dokumen	36,110,000.00	7 Laporan	42,438,300	7 Laporan	38,796,100	100%	91%	2 Dokumen	99,659,600	1 dok	93,194,000	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	541,696.000	2 Dokumen	49,509,500.00	2 dokumen	81,848.000	2 dok	78628000.00	100%	96%	7 Laporan	49,939,500	4 Laporan	2,909,000	-
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase adm keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>111,786,686,400.00</b>	<b>100%</b>	<b>16,777,923,843.00</b>	<b>100%</b>	<b>18,849,625,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>16,554,193,120</b>	<b>100%</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>	<b>19,716,395,739</b>	<b>25%</b>	<b>5,229,953,569</b>	<b>-</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang	111,597,365,000.00	131 orang	16,777,923,843.00	125 orang	18,822,085.000	113 org	16,530,179,120	100%	88%	125 Orang	19,674,614,339	118 org	5,219,978,569	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28 Dokumen	189,321,400.00	0	-	7 Laporan	27,540,000	7 Laporan	24,014,000	100%	87%	7 Laporan	41,781,400	2 Laporan	9,975,000	-
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>889,682,000.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>299,658,000</b>	<b>0.25</b>	<b>158,144,000</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	489,684,000.00	0	-	-	-	0	-	100%	0%	1 Paket	99,684,000	0	0	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	399,998,000.00									120 Orang	199,974,000	120 orang	158,144,000	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penyediaan adm umum perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>7,117,103,300.00</b>	<b>99%</b>	<b>1,116,842,997.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,411,033,500.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,366,151,993</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>1,243,739,800</b>	<b>25%</b>	<b>160,408,557</b>	<b>-</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	98,910,000.00	12 jenis	21,812,000.00	1 Paket	9,999,500	1 Paket	9725000.00	100%	97%	1 Paket	11,910,500		-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2,074,053,800.00	42 Jenis, 15 Jenis	535,086,899.00	2 Paket	641,444.000	2 Paket	624,949,250	100%	97%	2 Paket	399,999,800	1 paket	43,930,000	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	121,876,000.00	27 Jenis	19,284,500.00	1 Paket	15,000,000	1 Paket	14,877,000	100%	99%	3 Paket	11,998,500	1 Paket	5,925,735	-

kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-3)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2023 (N-2)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024 (N-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		kinerja	keuangan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
							kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan			kinerja	keuangan		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2,228,087,000.00	3 jenis	188,984,600.00	3 Paket	378,135,000	3 Paket	369,510,860	100%	98%	3 Paket	349,952,000	3 Paket	42,926,000	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	454,981,000.00	18 Jenis	57,212,100.00	1 Paket	44,989,000	1 Paket	26185250.00	100%	58%	2 Paket	24,992,000	0	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	2,139,195,500.00	2 jenis	294,462,898.00	12 Laporan	321,466,000	12 Laporan	320,904,633	100%	100%	12 Laporan	444,887,000	3 Laporan	67,626,822	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	100%	6,962,598,000.00	60%	154,950,000.00	100%	-	-	-	50%	0%	100%	2,973,799,000	0	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	6,962,598,000.00	3 unit	154,950,000.00	-	-	-	-	50%	0%	3 Unit	2,973,799,000	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6,672,503,000.00	100%	943,924,795.00	100%	1,298,920,000.00	100%	1,247,426,671	100%	96%	100%	1,388,728,000	25%	307,964,105	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	2,736,889,000.00	12 Bulan	307,426,115.00	12 Laporan	586,800,000	12 Laporan	540,770,671	100%	92%	12 Laporan	670,000,000	3 Laporan	144,159,793	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	3,935,614,000.00	12 bulan	636,498,680.00	12 Laporan	712,120,000	12 Laporan	706,656,000	100%	99%	12 Laporan	718,728,000	3 Laporan	163,804,312	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	2,055,624,000.00	100%	454,956,244.00	100%	429,660,000.00	100%	366,639,000	100%	85%	100%	432,110,000	25%	33,898,200	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 unit	935,934,000.00	28 unit	352,012,704.00	15 unit	199,780,000	15 unit	197,864,000	100%	99%	60 Unit	204,840,000	10 unit	30,898,200	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya	93 unit	152,775,000.00	13 jenis	23,959,850.00	23 unit	29,880,000	23 unit	29700000.00	100%	99%	20 Unit	29,620,000	4 unit	3,000,000	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	966,915,000.00	4 gedung	78,983,690.00	3 unit	200,000,000	3 unit Gedung	139,075,000	100%	70%	3 Unit	197,650,000	0	-	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	kecepatan rata-rata	28 km/jam	349,152,251,202	26.70	53,442,780,584	26.00	64,355,361,438	26.86	60,853,747,363	105.33%	95%	26.50	59,478,740,200	25,91	10,382,665,366	-	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	cakupan integrasi perencanaan transportasi	100%	2,725,000,000.00	-	-	100%	450,000,000.00	60%	442,294,000	100%	98%	100%	375,000,000	0.25	-	-	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	400,000,000.00	-	-	-	-	-	-	100%	#DIV/0!	-	-	0	-	-	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	24 dokumen	2,325,000,000.00	-	-	5 Dokumen	450,000,000	5 Dok	442,294,000	100%	98%	Dokumen	375,000,000	0	-	-	

kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-3)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2023 (N-2)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024 (N-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
			kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
							kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan	11,11%	220,595,536,151	11	33,922,129,506	11,11%	41,172,844,838	11,75%	38,804,092,377	108.46%	94%	7,23%	38,165,729,600	0	6,241,415,791	-		
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	7 unit	5,613,700,000.00	0	-		-	-	100%	#DIV/0!	2 Unit	213,700,000	0	-	-			
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	970 unit	13,567,189,800.00	6 Jenis	1,872,978,240.00	270 Unit	1,917,190,200	267 unit	1,937,580,000	100%	101%	200 Unit	1,121,784,600	0	-	-		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	57 unit	1,239,990,000.00	19 Unit	138,688,150.00	10 Unit	115,000,000	10 unit	114,306,900	100%	99%	12 Unit	299,999,000	0	-	-		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	619 unit	11,694,463,000.00	5 jenis	1,314,821,900.00	353 Unit	3,094,463,000	353 Unit	3,070,889,610	100%	99%	66 Unit	3,090,542,000	0	-	-		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (PJU)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3547 unit	177,956,969,051	595 Unit	28,833,722,265.00	937 unit	33,922,967,338	937 unit	31,751,973,367	80.23%	94%	666 Unit	31,339,704,000	0	5,872,349,291	-		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (PJU)	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	29.000 unit	10,523,224,300.00	5800 unit	1,761,918,951.00	5800 unit	2,123,224,300	8432 unit	1,929,342,500	100%	91%	5800 Unit	2,100,000,000	0	369,066,500	-		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun	31.900.000 orang	28,454,739,300.00	3621153 orang	4,756,047,671.00	5.000.000 orang	5,454,739,300.00	3.241.894 org	5,045,214,161	91.92%	92%	5500000 orang	4,603,222,800	792.338 orang	1,006,271,249	-		
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 unit	2,700,000,000.00	0	-	0	-	0	0		0	-	0	-	-	-		
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	jumlah unit	2 unit	200,000,000.00	0	-	0	-	0	0		0	-	0	-	-	-		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 terminal	25,554,739,300.00	1 terminal	4,756,047,671.00	1 terminal	5,454,739,300	1 term	5,045,214,161	100%	92%	1 Unit	4,603,222,800	1 Unit	1,006,271,249	-		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100%	2,499,999,000.00	100%	281,193,000.00	100%	499,999,000.00	100%	488,877,150	97%	98%	100%	343,279,900		125,580,000	-		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Laporan	2,499,999,000.00	7 lokasi	281,193,000.00	12 Laporan	499,999,000	12 Laporan	488,877,150	100%	98%	12 Laporan	343,279,900	3 Laporan	125,580,000	-		
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	95%	15,086,806,451.00	97.8%	1,725,231,833.00	95%	2,235,571,000.00	97	1,944,964,725	100%	87%	95%	1,724,845,000	95 %	186,143,546	-		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	49 unit	5,023,157,000.00	0	-	34 Unit	388,254,000	14 unit	251,512,100			16 Unit	299,999,500	0	-	-		
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 dokumen	2,450,222,188.00	0	-	1 dokumen	540,000,000	1 dokumen	503,760,000	100%	93%	1 Dokumen	55,000,000	0	-	-		
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 laporan	100,000,000.00	0	-	0	0	0	0					0	-	-		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 unit	648,688,500.00	2 jenis	102,559,500.00	11 Unit	128,991,000	11 Unit	128,189,500	100%	99%	13 Unit	249,847,000	0	-	-		

kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-3)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2023 (N-2)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024 (N-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							TARGET		REALISASI		CAPAIAN				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
			kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	48 Laporan	6,614,738,763	12 bulan	1,622,672,333.00	12 Laporan	1,128,326.000	12 Laporan	1,012,605,625	100%	90%	12 Laporan	1,069,998,500	3Laporan	186,143,546	-	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	250,000,000.00	0	-	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	48897500.00	50%	98%	1 Laporan	50,000,000	0	-	-	
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase titik pengawasan kemacetan</b>	<b>69%</b>	<b>71,484,332,400.00</b>	<b>40%</b>	<b>11,830,012,050.00</b>	<b>59%</b>	<b>13,619,352,400.00</b>	<b>59%</b>	<b>13,276,088,350.00</b>	<b>123%</b>	<b>97%</b>	<b>62,5%</b>	<b>13,047,590,300.00</b>	<b>62,5 persen</b>	<b>2,757,635,980.00</b>	-	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	48 Laporan	69,862,503,400	12 bulan	11,650,012,050.00	12 Laporan	13,397,523,400	12 Laporan	13,061,352,350	100%	97%	12 Laporan	12,848,153,000	3 Laporan	2,730,235,980	-	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	44 Laporan	1,621,829,000	2 Bulan, 11 Orang	180,000,000.00	11 Laporan	221,829,000	11 Laporan	214,736,000	100%	97%	11 Laporan	199,437,300	1 Laporan	27,400,000	-	
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Andalalin yang dikeluarkan</b>	<b>100%</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>12 bulan</b>	<b>123,541,000.00</b>	-	-	-	-	96%	#DIV/0!	100 %	25,000,000	25%	3,750,000	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	36 Dokumen	300,000,000.00	8 Dokumen	123,541,000.00	-	-	0	0	100%	#DIV/0!	12 Laporan	25,000,000	3 Lap	3,750,000	-	
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>load factor</b>	<b>32.5%</b>	<b>5,854,960,000.00</b>	<b>27.90%</b>	<b>540,485,524.00</b>	<b>31</b>	<b>378,968,000.00</b>	<b>43.7</b>	<b>356,890,910</b>	100%	94%	31 %	644,684,000	31 %	31,054,200	-	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3500 unit	5,084,960,000	1 koridor	446,181,524.00	6 Unit	228,968.000	6 Unit	207,853,360	100%	91%	12 Laporan	100,000,000	3 Lap	-	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 laporan	770,000,000	13 dokumen	94,304,000.00	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	149,037,550	100%	99%	3500 Unit	544,684,000	3500 Unit	31,054,200	-	
	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perencanaan dan kebijakan angkutan umum</b>	<b>100%</b>	<b>238,429,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>238,429,000</b>	<b>100%</b>	<b>194,212,500</b>				-	0	-	-	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	238,429,000.00	0	-	1 dokumen	238,429,000	1 dokumen	194,212,500			0	-	0	-	-	

kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2022 (N-3)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SD TA 2023 (N-2)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024 (N-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							TARGET		REALISASI		CAPAIAN				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
			kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja	keuangan	kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	rasio ijin trayek	0,0022	1,912,448,900.00	0.002	264,140,000.00	0,0022	305,457,900.00	0.0015	301,113,190	81%	99%	0.0022	549,388,600	0,0015	30,814,600	-
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	48 Laporan	814,648,000.00	3 Orang, 12 Bulan	144,705,000.00	12 Laporan	147,648,000	12 Laporan	145,640,080	100%	99%	12 laporan	165,000,000	0	30,814,600	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Laporan	1,097,800,900.00	2 Jenis	119,435,000.00	2 Laporan	157,809,900	2 Laporan	155,473,110	100%	99%	3 Laporan	384,388,600	0	-	-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian</b>	<b>100%</b>	<b>699,735,000.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>98,300,000.00</b>	<b>96%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>99,183,150.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>	<b>persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian</b>	<b>100%</b>	<b>699,735,000.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>98,300,000</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>99,183,150.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 dokumen	200,000,000.00	0	-	0	-					0	-	0	-	-
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	4 dokumen	499,735,000.00	0	-	1 dokumen	100,000,000.00	1 dokumen	98,300,000	100%	98%	1 Dokumen	99,183,150.00	0	-	-
			-	486,164,651,502.00	-	72,976,997,963.00	-	86,568,886,238.00		80,603,882,247.00		93.11%	-	85,781,952,989.00	-	16,369,136,797	

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Perhubungan Kota Depok dan pencapaian target Renstra dari tahun 2022 sampai Tahun 2023 telah mencapai target capaian kinerja sesuai yang telah ditetapkan. Khusus pada tahun 2023, Dinas Perhubungan memiliki anggaran Rp.86.568.886.238 dengan realisasi keuangan Rp. 80.602.282.997 dan capaian 93.11% serta capaian fisik kinerja sebesar 99.79 %. Pada umumnya semua target baik program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan dengan baik. Efisiensi berasal dari sisa anggaran gaji dan tunjangan PNS, anggaran listrik PJU, gaji PKTT yang tidak terserap karena pensiun dan mengundurkan diri serta efisiensi dari pengadaan barang dan jasa.

Berkaitan dengan evaluasi indikator kinerja utama, Dinas Perhubungan telah menetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Depok. Pencapaian dari indikator tersebut yaitu 2 (dua) indikator mencapai target yaitu v/c ratio (100%, kategori capaian sangat tinggi) dan Nilai Sakip (100.35%, kategori capaian tinggi)

Penjabaran hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator yang ditetapkan tahun 2023 sebagai berikut :

**a. Sasaran 1, Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Merata, Berkualitas, Ramah dan Nyaman dengan indikator tingkat pelayanan jalan (Level of Service) dengan target tahun 2023 adalah 0,74 (D).**

Dinas Perhubungan pada tahun 2023, memiliki target level of service 0,74 realisasi 0,74 dengan capaian 100%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Telah beroperasinya *underpass* Dewi Sartika yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Sudah beroperasi tol Cijago Sesi 3 sehingga volume lalu lintas lebih menyebar
3. implementasi perbaikan simpang : simpang arif rahman hakim, simpang sengon, simpang jembatan sting
4. terdapat jaringan jalan baru yang dapat memecah volume lalu lintas contoh ruas jalan Sila at Sawangan memecah volume lalu lintas di jalan Bojong Sari dengan ruas jalan Muchtar, Gardens at Candi Sawangan menjadi alternatif dari wilayah Bojong Sari ke wilayah Pondok Petir dan Tangerang.
5. Meningkatnya kinerja LoS juga didukung oleh kenaikan modashare angkutan umum (penggunaan angkutan umum) terutama kenaikan jumlah penumpang commuterline.
6. Dari segi pemanfaatan APBD : Adanya pengembangan *Integrated Area System of Transportation Center (IAS-TC)* dalam pemantauan arus lalu lintas dan simpang yang berfungsi dalam

manajemen lalu lintas melalui pengaturan siklus secara adaptif terhadap antrian dan tundaan, penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, Pelaksanaan penertiban parkir sehingga mengurangi hambatan samping , Adanya petugas pengawas arus lalu lintas , Pengadaan Penerangan Jalan Umum sehingga ruas jalan di Kota Depok menjadi lebih terang dan berpengaruh pada keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kajian penataan ruas jalan dan simpang serta perbaikan jalan berkordinasi dengan Bappeda, Dinas Rumkin dan Dinas PU

**b. Sasaran 2 Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Merata, Berkualitas, Ramah dan Nyaman dengan indikator sasaran Moda share, target tahun 2023 18.5%, realisasi 15.91%, capaian 86%**

Perjalanan masyarakat untuk menuju suatu tempat tujuan dibagi menjadi dua moda, yaitu dengan menggunakan angkutan umum dan menggunakan kendaraan pribadi. Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan umum (Moda Share) yaitu dengan membandingkan jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum per hari dengan total keseluruhan perjalanan per hari. Pada Tahun 2023, dengan target 18.5%, aktualisasi perjalanan menggunakan angkutan umum mencapai 15.91% dengan capaian kinerja 86%. Akan tetapi realisasi ini juga tidak berbeda jauh dari kondisi DKI Jakarta yang moda sharenya 18.45%

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, yaitu :

1. Belum terlaksananya Revitalisasi Angkutan Umum, menjadi alasan banyak masyarakat enggan menggunakan Angkutan Umum yang ada dengan pertimbangan waktu, kenyamanan dan trayek angkutan yang sulit dijangkau dari rumah. Revitalisasi angkutan umum sendiri bukan hal yang mudah dilaksanakan dan membutuhkan waktu yang panjang mulai dari perencanaan, implementasi, pembiasaan masyarakat menggunakan angkutan umum dan juga menggunakan biaya yang besar.
2. Dengan pertimbangan kepastian hukum, tingkat kenyamanan dan door to door service, kendaraan pribadi masih menjadi alat transportasi andalan untuk menunjang kegiatan sehari – hari masyarakat .
3. Lebih dari 50% angkutan umum di Kota Depok sudah tidak layak beroperasi sehingga membutuhkan peremajaan untuk menarik masyarakat lebih senang menggunakan angkutan umum
4. Belum tersedianya pelayanan angkutan umum massal yang layak, efisien dan ekonomis
5. Belum terbentuknya integrasi dan konektivitas angkutan umum sehingga masyarakat menganggap masih kurang efisien contohnya belum terbangunnya terminal Sawangan dan Pondok Rajeg
6. Alokasi anggaran Pemerintah Kota Depok untuk pengembangan transportasi masih minim,

belum sepenuhnya menerapkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah “Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Adanya MoU antara Pemkot Depok dengan BPTJ Kemenhub tentang sinergi perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengoperasian layanan angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan/Buy The Service di Kota Depok. Program Buy The Service dilakukan dengan membeli layanan (memberikan subsidi 100%) dari operator dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pemerintah menetapkan diri diantara konsumen dan produsen. Pemerintah mengumpulkan ongkos yang dibayar konsumen lalu menggunakan uang itu untuk “membeli” layanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator. Pemerintah menanggung resiko jika uang yang diterima dari konsumen tidak cukup untuk membayar layanan yang telah diselenggarakan oleh produsen sehingga dapat meminimalisir tarif angkutan umum dan menarik masyarakat untuk menggunakannya. Kota Depok mendapatkan subsidi 1 koridor untuk dilaksanakan di Tahun 2024 dan akan mengusulkan 2 koridor tambahan untuk meningkatkan layanan angkutan umum.
  2. Adanya kerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum untuk beroperasinya layanan JRC (Jabodetabek Residence Connexion) dan JAC (Jabodetabek Airport Connexion) untuk meningkatkan layanan angkutan umum terutama masyarakat yang akan ke jakarta dan bandara.
  3. Pemindehan layanan perijinan angkutan dari Dinas Perhubungan ke Dinas Perijinan yang mengubah layanan manual menjadi elektronik untuk memudahkan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat/badan hukum angkutan
  4. Telah beroperasinya LRT sehingga pengguna angkutan umum bertambah. Didukung juga dengan beroperasinya transjakarta D11 rute terminal margonda – BKN dengan melewati stasiun LRT sehingga memudahkan masyarakat untuk ke stasiun LRT.
  5. Adanya penerapan kebijakan di DKI Jakarta untuk uji emisi dan kenaikan tarif parkir sehingga mengakibatkan pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan angkutan umum.
- c. Sasaran 3, Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Birokrasi dengan indikator Nilai Sakip, target 70,50, realisasi 70,75 capaian 100,35%.**

Indikator sasaran ini untuk mengukur dan mengevaluasi seluruh komponen manajemen kinerja di Dinas Perhubungan Kota Depok. Penilaian dan evaluasi indikator ini dilaksanakan oleh

Inspektorat daerah setiap tahun. Dinas Perhubungan Kota Depok mencapai kategori BB yang artinya akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Pada tahun 2023 mencapai realisasi 70,75% dengan capaian 100,35% yang artinya sudah tercapai dari target 70,50.

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja diantaranya :

1. Peningkatan layanan perhubungan dengan pengembangan teknologi informasi
2. Pelaksanaan kegiatan rutin yang mendukung layanan perhubungan
3. Pendampingan dan review kinerja dengan Irda
4. Melaksanakan review Renstra
- 5 . Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin

## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok yang diturunkan dalam Peraturan Walikota Depok nomor 79 tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Depok diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu :

- a. 10 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- b. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan di masa lalu sehingga bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok selama beberapa tahun ke belakang dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Depok**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)				176,863,472	189,178,402	202,350,816	25,000,000	27,000,000	141,947,703	80,673,259	21,609,727	18,509,715	29,561,242	80%	43%	11%	74%	109%
2	Rasio ijin trayek (nilai)				0.0025	0.0024	0.0023	0.0022	0.0022	0.0012	0.0021	0.0021	0.0021	0.0023	48%	88%	91%	93%	105%
3	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)				18,549	18,549	18,549	12,000	12,500	14,896	14,305	10,421	10,949	10,025	80%	77%	56%	91%	80%
4	Jumlah Terminal Bis (lokasi)				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase layanan angkutan darat (persen)				N/A	N/A	N/A	N/A	0.04%	0,004%	0,007%	0,03%	0.07%	0.013%	N/A	N/A	N/A	N/A	33%
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (persen)				0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.43%	0,41%	0,29%	0,71%	0.52%	0.54%	95%	126%	18%	67%	74%
7	Pemasangan Rambu-rambu (persen)				7.23%	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%	5.46%	1.73%	1.36%	8.35%	9.08%	76%	24%	19%	115%	126%
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (nilai)				N/A	N/A	N/A	0.0013	0.0013	0.0017	0.0015	0.0014	0.0013	0.0017	N/A	N/A	N/A	100%	133%
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (orang)				176,863,472	189,178,402	202,350,816	25,000,000	27,000,000	141,947,703	80,673,259	21,609,727	18,509,715	29,561,242	80%	43%	11%	74%	109%
10	Jumlah orang melalui terminal per tahun (orang)				N/A	N/A	N/A	4,400,000	4,500,000	6,556,386	7,823,157	4,394,083	3,810,029	4,136,472	N/A	N/A	N/A	87%	92%

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok, data telah diolah*

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan di tahun – tahun sebelumnya dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum yang mengalami penurunan secara signifikan yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun tersebut masih menggunakan target renstra periode sebelumnya yaitu 2016 – 2021 sedangkan kondisi angkutan umum sudah semakin turun akibat adanya angkutan online yang semakin berkembang sehingga terjadi penurunan jumlah angkutan umum yang beralih ke angkutan online. Pada tahun 2020 dengan terjadinya pandemi covid yang diiringi dengan adanya kebijakan pembatasan kegiatan, memperburuk kondisi angkutan umum dan menurunnya jumlah penumpang angkutan umum.

2. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek menggunakan rumus jumlah ijin trayek dibagi jumlah penduduk. Realisasi tidak ada gap yang signifikan karena telah diperbaiki target. Tahun 2018 capaian rendah karena angkutan umum yang mengurus ijin trayek semakin menurun seiring dengan perkembangan angkutan online.

3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Adalah jumlah yang melaksanakan uji kir. Tidak ada gap yang besar kecuali di tahun 2019 dan 2020 karena adanya pandemi covid 19 dan pelayanan uji kir sempat ditutup selama 3 bulan dan juga dilakukan pembatasan.

4. Jumlah Terminal

Ada 2 terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan

5. Persentase layanan angkutan darat

Pada renstra tahun sebelumnya tidak ada target kinerja untuk persentase layanan angkutan darat. Pada tahun 2022, capaian realisasi dibawah 50% yaitu 33%. Hal ini disebabkan jumlah angkutan umum semakin menurun dan jumlah penumpang angkutan umum sudah mulai naik setelah pandemi covid.

6. Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum

Adanya gap penurunan kinerja di tahun 2020, hal ini disebabkan adanya pembatasan baik pelayanan pada masa pandemi covid 19. Pelayanan uji kir ini juga sempat ditutup selama 3 bulan.

## 7. Pemasangan Rambu

Pemasangan rambu ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.ada gap penurunan kinerja pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena adanya pandemi covid 19 dan adanya refocusing/pengurangan anggaran.

## 8. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Realisasi capaiannya lebih dari 100% dengan rumus = jumlah angkutan darat : jumlah penumpang angkutan darat x 100% (3954:29.561.242)x100%. Data jumlah angkutan darat diambil dari data Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat.

## 9. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum

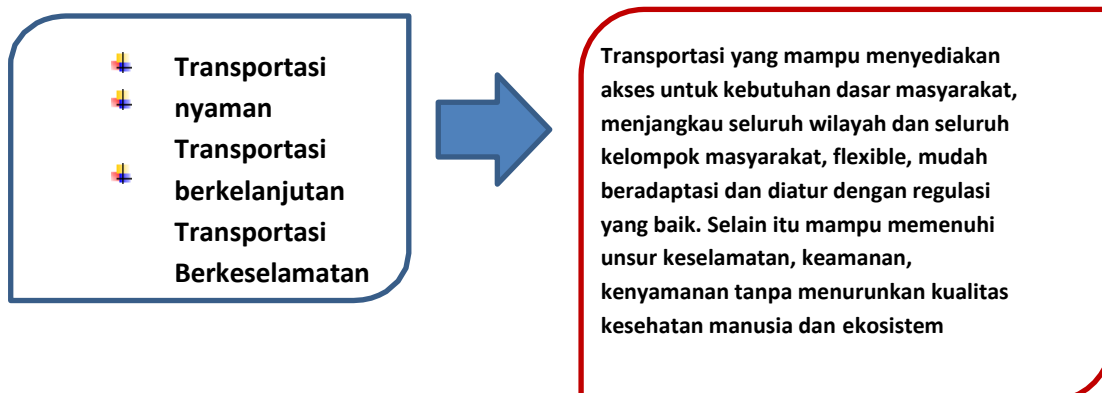
Jumlah penumpang angkutan umum yang mengalami penurunan secara signifikan yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun tersebut masih menggunakan target Renstra periode sebelumnya yaitu 2016 – 2021 sedangkan kondisi angkutan umum sudah semakin turun akibat adanya angkutan online yang semakin berkembang sehingga terjadi penurunan jumlah angkutan umum yang beralih ke angkutan online. Pada tahun 2020 dengan terjadinya pandemic covid yang diiringi dengan adanya kebijakan pembatasan kegiatan, memperburuk kondisi angkutan umum dan menurunnya jumlah penumpang angkutan umum

## 10. Jumlah orang melalui terminal per tahun

Tidak ada gap yang tinggi antara target dan capaian kinerja. Jumlah penumpang yang melalui terminal juga meningkatkan dengan telah beroperasinya terminal jatijajar.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam mencapai target dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Depok, Dinas Perhubungan mengusung paradigma harapan untuk urusan perhubungan dan pengembangan transportasi di Kota Depok yaitu :



Sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2022-2026 Dinas Perhubungan Kota Depok mengacu ke Misi 1 dan 2 yaitu :

Misi 1 :

- **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Misi 2 :

- **MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MODERN DAN PARTISIPATIF**

Dalam upaya meningkatkan pengembangan pelayanan, maka Dinas Perhubungan Kota Depok harus mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dihadapinya berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana dirumuskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3 Isu Strategis dan Telaah Permasalahan Bidang Perhubungan**

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
1.	Infrastruktur jalan terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya ruas serta kapasitas jalan dan simpang (lintas urusan).</li> <li>• Pusat pertumbuhan belum terbentuk secara merata (lintas urusan)</li> <li>• Belum semua jalan bermarka dan dilengkapi rambu serta PJU</li> </ul>
2.	Transportasi publik belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angkutan kota kurang nyaman</li> <li>• BRT (<i>Bus Rapid Transit</i>) dan JRC (<i>Jabodetabek Residence Connection</i>) masih terbatas</li> <li>• Belum adanya subsidi bagi angkutan umum</li> <li>• Angkutan massal berbasis rel di 4 (empat) koridor belum terlaksana</li> </ul>
3.	Integrasi dan konektivitas transportasi belum terbentuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TOD atau hub belum terlaksana</li> <li>• Simpul transportasi masih kurang memadai</li> <li>• Park and Ride belum tersedia</li> <li>• Halte belum merata</li> <li>• Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi</li> <li>• First and last mile tidak efisien</li> </ul>

Dinas Perhubungan merupakan unit teknis di Pemerintah Daerah Kota Depok yang terkait dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang penting dalam menunjang perekonomian dan pembangunan. Sesuai dengan tema Forum OPD Dinas Perhubungan Tahun 2025, ***Membangun Sinergi Menuju Depok Lancar Depok Terang***, berbagai upaya dilakukan agar angkutan umum kembali menjadi pilihan utama masyarakat dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Perkembangan Pembangunan di berbagai sektor tentunya juga membawa dampak bagi permasalahan transportasi. Masalah transportasi di kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalu lintas.

Dengan kondisi V/C Ratio 0,74, Kecepatan rata-rata 26,86 dan level of service "D", kemacetan lalu lintas menjadi realitas kehidupan Kota Depok yang harus dihadapi, baik di setiap persimpangan maupun pada ruas-ruas jalan utama seperti Jalan Margonda Raya, Jalan Nusantara Raya, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kartini, Jalan Tole Iskandar, Jalan Raya Bogor, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan M. Yasin, Jalan Raya Sawangan, Jalan Muchtar Raya dan Jalan Bandung. Kemacetan ini terjadi pada saat peak hour di pagi dan sore hari ketika weekday dan di sepanjang hari ketika weekend (Sabtu dan Minggu).

Untuk menopang kebutuhan warga dalam memenuhi kebutuhan transportasi publik, saat ini kondisi angkutan umum terutama angkutan kota (angkot) banyak yang tidak layak. Dari data awal jumlah angkot sebanyak 2810 unit, yang berbadan hukum dan berizin hanya 1497 unit atau 53,27%, itupun kondisinya banyak yang sudah tidak layak karena tidak mampu lagi untuk diremajakan. Maraknya angkutan online menjadi penyebab kurang menariknya warga menggunakan angkot, sehingga load factor angkutan umum hanya mencapai 24,85%. Di bawah ini pemetaan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

*Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan antara lain adalah:*

1. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi.
2. Keterbatasan alokasi anggaran. Kurang lebih 50% pagu anggaran dialokasikan untuk pembayaran rekening listrik PJU dan honor non ASN sehingga banyak perencanaan kegiatan yang tidak bisa terealisasi
3. Belum optimalnya sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan seperti crane, kendaraan operasional, kendaraan derek, ruang pelayanan UPT PKB dan lahan parkir PKB.
4. Masih minimnya penggunaan teknologi dalam pelayanan perhubungan,

5. Belum optimalnya Integrasi antar moda sehingga dapat mengefisienkan biaya, tenaga dan waktu pengguna jasa transportasi.
6. Kemacetan Lalu lintas dengan faktor yang mempengaruhi sebagai berikut :
  - a. Kinerja jaringan jalan, kapasitas jalan dan simpang kurang memadai. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan jalan di Kota Depok karenamakin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit.
  - b. Maraknya transportasi daring yang minim pengawasan dari pemerintah sehingga kinerja angkutan umum menurun. Dan juga pola hidup masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan pribadi.
  - c. transportasi publik kurang nyaman, sehingga tidak menjadi pilihan utama masyarakat.
  - d. Perilaku pengguna jalan kurang tertib dan kurangnya fasilitas parkir. Masih maraknyapraktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Dari permasalahan yang ada maka peluang yang bisa diambil yaitu :

1. Komitmen Kepala Daerah dalam mengatasi kemacetan di Kota Depok
2. Usulan Anggaran ke Pemerintah provinsi Jawa Barat dan Pusat (Kementerian Perhubungan)
3. Perhatian dari Bappeda Kota Depok untuk mengintegrasikan perencanaan baik dari Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai upaya mengurai kemacetan.
4. Adanya Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis rel dalam upaya pengembangan sistem angkutan umum masal (SAUM) yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;
5. Adanya kerjasama dengan BRT/JRC DAN BAC;
6. Terbentuknya Dewan Transportasi Kota Depok sebagai pendorong terlaksananya kebijakan urusan Perhubungan.
7. Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rencana Induk Perkeretaapian sebagai dasar perencanaan pengembangan transportasi kedepan.
8. Telah beroperasinya LRT Harjamukti untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum oleh masyarakat

9. Adanya mekanisme pendanaan pengembangan angkutan umum yaitu subsidi buy the service oleh Kementerian Perhubungan dan Kota Depok telah mengajukan usulan subsidi tersebut.
10. Adanya RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) dari BPTJ yang dapat mendukung dan membantu pengembangan transportasi khususnya di Kota Depok
11. Adanya DED pembangunan terminal Sawangan untuk meningkatkan konektivitas transportasi.
12. Adanya pembangunan jalan tol baru yang melewati Kota Depok
13. Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg
14. Adanya manajemen rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan untuk meningkatkan kinerja ruas jalan
15. Memiliki alat pemantau arus lalu lintas yang canggih dan dapat mengatur antrian dan tundaan di simpang simpang secara adaptif.

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2022-2026. Dengan tema pembangunan Kota Depok Tahun 2025 yaitu **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA** dan tema forum OPD Dinas Perhubungan **MEMBANGUN SINERGI MENUJU DEPOK LANCAR DEPOK TERANG**.

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Depok telah merencanakan 3 Program, 18 Kegiatan dan 40 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar RP. 78.270.153.150. Review terhadap rancangan awal RKPD untuk melihat bahwa ada beberapa kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan diantaranya :

NO	SUB KEGIATAN	Kebutuhan Anggaran	KETERANGAN
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	Rp.100.000.000	Pagu dialihkan ke Pemeliharaan Gedung
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 600.000.000	Pagu dialihkan ke : 1. Pengadaan Pakaian Rp. 23.000.000 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 50.000.000 3. Pengadaan Logistik Rp. 30.000.000 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 109.000.000 5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Rp. 188.000.000 6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 200.000.000
3	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp 425.000.000	Penambahan Pagu Rp.50.000.000 dari Pemeliharaan CCTV
4	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 228.700.000	Penambahan Pagu Rp. 15.000.000 dari Pemeliharaan CCTV
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 2.484.200.000	Pemeliharaan CCTV dikurangi Rp. 65.000.000 untuk kajian sebesar Rp. 30.000.000 dan halte sebesar Rp.15.000.000
6	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (UPT PJU)	Rp. 28.235.805.748	Pengurangan Rp. 22.500.000 pembelian PC
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp. 4.570.000.000	Pengurangan Lembur
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 350.440.000	Pengurangan Hasil Desk Rp. 44.560.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 19.400.000.000,-</b>	<b>(Sembilan belas milyar empat ratus jutarupiah)</b>

Hasil review dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.4.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025**  
**Dinas Perhubungan Kota Depok**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan 2026	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
1					2	3	4	5	6	7	8
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			100 %	78.270.153.150		
2	15				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			100 %	78.270.153.150		
2	15	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100 %	21.701.840.000		
2	15	01	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>		100 %	200.000.000		
2	15	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	2 dokumen	150.000.000		
2	15	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	7 Laporan	50.000.000		
2	15	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase administrasi keuangan tepat waktu</b>		100 %	18.040.000.000		
2	15	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	125 orang	18.000.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan 2026	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	7 laporan	41.000.000		
2	15	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		100 %	175.000.000		
					Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 paket	75.000.000		
					bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	120 Orang	100.000.000		
2	15	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penyediaan administrasi umum perkantoran</b>		100 %	960.000		
2	15	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 paket	10.000.000		
2	15	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	2 paket	220.000.000		
2	15	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 paket	10.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan 2026	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	3 paket	300.000.000		
2	15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 paket	20.000.000		
2	15	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 laporan	400.000.000		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase barang milik daerah dalam pelayanan</b>		<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>		
					Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah paket pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 Unit	600.000.000		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>1.401.840.000</b>		
2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	680.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan 2026	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Depok, Cilodong, Semua Kelurahan	12 laporan	721.84.000		
2	15	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase barang milik daerah kondisi baik</b>		<b>100 %</b>	<b>325.000.000</b>		
2	15	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	60 unit	150.000.000		
2	15	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	25 unit	25.000.000		
2	15	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	3 unit	150.000.000		
2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Kecepatan Rata-rata</b>		<b>27 Km/jam</b>	<b>56.493.313.150</b>		
2	15	02	2,01		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Integrasi Perencanaan Transportasi</b>		<b>100 %</b>	<b>375.000.000</b>		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan 2026	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	02	2,01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	6 dokumen	375.000.000		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2,02</b>		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan</b>		<b>11.11 %</b>	<b>34.708.313.150</b>		
2	15	02	2,02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 unit	213.700.000		
2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	250 unit	999.632.600		
2	15	02	2,02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	10 unit	143.475.000		
2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	100 unit	2.549.200.000		
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2,04</b>		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>persentase rekomendasi yang dikeluarkan</b>		<b>100 %</b>	<b>350.000.000</b>		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan 2026	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	02	2,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 laporan	350..000.000		
2	15	02	2,06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase titik pengawasan kemacetan</b>		46.15 %	12.740.000.000		
2	15	02	2,06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 laporan	12.640.000.000		
2	15	02	2,06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	11 laporan	100.000.000		
2	15	02	2,07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>		100%	50.000.000		
2	15	02	2,07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	50.000.000		
2	15	02	2,09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Load factor</b>		32 %	1.200.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan 2026	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2	15	02	2,09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	3500 unit	1.000.000.000		
2	15	02	2,09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	200.000.000		
2	15	02	2,14		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>rasio Ijin Trayek</b>		<b>0.0023 nilai</b>	<b>570.000.000</b>		
2	15	02	2,14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 Laporan	170.000.000		
2	15	02	2,14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	2 Laporan	400.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan 2026	ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			5.150.000.000			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata		27 Km/jam	5.150.000.000		
2	15	02	2,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Orang Yang Melalui Terminal Setiap Tahun		6.000.000.000 Orang	4.600.000.000		
2	15	02	2,03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya		0		
2	15	02	2,03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan dipelihara	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 terminal	4.600.000.000		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			32.100.000.000			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata		27 Km/jam	32.100.000.000		
2	15	02	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan		11.11 %	30.802.305.550		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan 2026	ket	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana			
2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	600 unit	28.302.305.550			
2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	5800 unit	2.500.000.000			
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	15				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>							
2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	kecepatan rata-rata		27 Km/jam	1.900.000.000			
2	15	02	2,05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum</b>		95 %	1.900.000.000			
2	15	02	2,05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	5 unit	150.000.000			
2	15	02	2,05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 dokumen	450.000.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan 2026	ket	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana			
2	15	02	2,05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	13 unit	150.000.000			
2	15	02	2,05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	12 laporan	1.000.000.000			
2	15	02	2,05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	1 laporan	150.000.000			
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	15				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>							
2	15	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	Persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian		<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>			
2	15	05	2.10		<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>	Persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian		<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>			
2	15	05	2.10	0002	<b>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian</b>	Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian		1 dokumen	75.000.000			

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari mengadakan Forum Renja yang di hadiri dari berbagai unsur diantaranya :

1. Perwakilan Kecamatan
2. Unsur OPD
3. Wakil Kelompok masyarakat antara lain :
  - a. Kepolisian
  - b. LPM Kecamatan
  - c. LPM Kelurahan
  - d. Organda
  - e. Forum Anak Kota Depok, perwakilan Osis Sekolah
  - f. Organisasi Wanita seperti PKK, GOWD, Dharma Wanita
  - g. Perusahaan, baik perdagangan dan jasa

Hampir setiap tahun, usulan masyarakat biasanya terkait penerangan jalan lingkungan. Mulai Tahun 2021 Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan bisa diakomodir atau dianggarkan melalui dana kelurahan dan dikelola di masing masing kelurahan. Akan tetapi dalam rencana penganggaran Tahun 2025, Dinas Perhubungan juga mengakomodir Pokok Pikiran dari DPRD Kota Depok yang telah di survey dan tertuang dalam Berita Acara yang menyatakan layak atau tidak layak. Usulan tersebut sebagaimana di bawah ini :

**Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD  
Yang Telah di Setujui oleh TAPD  
TAHUN ANGGARAN 2025**

ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
671734	23-02-2024	H. T.M. YUSUFSY AH PUTRA	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Mebutuhkan penerangan jalan dan lingkungan di rt 001 rw 011, Kelurahan Beji	Rt 001, Rw 011, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	10	Titik	53,060,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
672492	23-02-2024	H. T.M. YUSUFSY AH PUTRA	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Mebutuhkan penerangan jalan dan lingkungan di kelurahan beji	Rw 12, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	5	Titik	26,530,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
674049	23-02-2024	H. KHAIRULL OH	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Penerangan jalan yang kurang dan mengkhawatirkan pengguna jalan akan kejahatan di malam hari	Pondok Petir RT 002 RW 001 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Depok, Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	15	Titik	79,590,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
681988	25-02-2024	TATI RACHMA WATI	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Jalan Gelap Perlu Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Jalan Sengon RT.003 RW.003 Kel.Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	8	Unit	42,448,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
682018	25-02-2024	TATI RACHMA WATI	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Jalan Gelap Rawan Tindakan Kriminal sangat penting untuk Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Jalan Makassar Barat dan Timur Blok M RT.001, RT.002, RT.003, RW.003, dan RT.004 RW.010 Kel.Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok , Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	10	Unit	53,060,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
693902	26-02-2024	H. HAMZAH, S.E., M.M	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Kurangnya Penerangan	Jl. RKB Lingkungan RT 02/04 Cimpaeun, Tapos, Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	15	UNIT	79,590,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
694113	26-02-2024	H. HAMZAH, S.E., M.M	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Kurangnya Penerangan	Jl. Lingkungan RT 01/09 Cimpaeun, Tapos, Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	15	UNIT	79,590,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
718774	28-02-2024	HJ. JUANAH SARMILI	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	belum adanya penerangan jalan berikut tiang listrik	Jl. Teluk Bayur RT 003 RW 007 Kelurahan Sukmajaya, Kec. Sukmajaya., Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	10	Titik	53,060,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
728893	29-02-2024	YUNI INDRIAN Y, SE., M. Si	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	PJU	Bumi Sawangan Indah RT 012 RW 010 Kel.Pengasina n Kec.Sawangan , Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	10	Unit	53,060,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
738681	01-03-2024	NURDIN AL ARDISOM A, S.IP	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	kurangnya penerangan lingkungan	Jln. Ceringin RT 003 RW 006 Kelurahan Pengasinan, Kec. Sawangan., Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	10	Unit	47,800,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
740125	01-03-2024	NURDIN AL ARDISOM A, S.IP	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	belum ada penerangan jalan	Jln. Kamboja RT 003 RW 002 Kelurahan Sawangan Lama, Kec. Sawangan, Kota Depok	Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan disetujui	5	Titik	26,530,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
767564	06-03-2024	H. MOHAM AD HB, S.E	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Kurangnya Penerangan	JL. Bulak Tambora RT 002/005 Limo,Limo, Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	5	Unit	26,530,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
767572	06-03-2024	H. MOHAM AD HB, S.E	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Minimnya Penerangan di Lingkungan	JL. Garuda Ujung Blok Inpres RT 006/006 Limo,Limo, Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	5	Unit	26,530,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
774706	07-03-2024	EDI SITORUS	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Belum Ada	JL. Portiara GG.Ebara RT 1 RW 5, Curug, Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	10	Titik	53,060,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
887250	21-03-2024	HENDRIK TANGKE ALLO, S. Sos	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 003/RW 007, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	5	Titik	26,530,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
838289	16-03-2024	YETI WULANDARI, S.H	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Kurangnya Penerangan di Jalan Lingkungan	Jl. Alamanda II 008 RW 007 Tugu, Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	10	Titik	53,060,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
677423	24-02-2024	H. TAJUDIN TABRI	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	rawan kecelakaan	jalan rait rt 06 rw 010 kelurahan tanah baru kec. beji, Kota Depok	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Usulan disetujui	10	Titik	53,060,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020-2025) diarahkan pada ***Terwujudan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif***. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal dan aman bagi seluruh masyarakat.

Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tercermin dalam sasaran dalam RPJMD 2021-2026 Kota Depok yaitu ***TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MERATA, BERKUALITAS, RAMAH DAN NYAMAN*** dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Depok yaitu ***MENINGKATNYA KINERJA RUAS JALAN YANG BERKESELAMATAN dan MENINGKATNYA LAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK YANG BERKELANJUTAN***.

Berikut telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu :

**3.1 Telaahan Pelayanan Dinas Perhubungan  
Kota Depok Berdasarkan Sasaran Renstra  
Kementerian Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan  
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

VISI : KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	<b>Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan</b>			
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Integrasi dan konektivitas transportasi di Kota Depok belum terbentuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TOD atau hub belum terlaksana</li> <li>2. Simpul transportasi masih kurang memadai</li> <li>3. Park and ride belum tersedia</li> <li>4. Halte belum merata</li> <li>5. Belum adanya system layanan transportasi yang terintegrasi</li> <li>6. <i>First and mile</i> tidak efisien</li> <li>7. Angkutan massal berbasis rel di 2 koridor belum terlaksana</li> <li>8. Feeder angkutan umum belum tersedia</li> <li>9. Masih minimnya minat swasta untuk penyediaan infrastruktur transportasi</li> <li>10. Terminal Sawangan belum terbangun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kerjasama dengan BRT, JRC dan JAC.</li> <li>2. Adanya kajian Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel.</li> <li>3. Telah beroperasinya LRT Harjamukti dengan feeder pendukungnya yaitu D11</li> <li>4. Telah diusulkannya subsidi buy the service ke Kementerian Perhubungan</li> <li>5. Telah disusunnya DED Pembangunan Terminal Sawangan</li> <li>6. Adanya kajian Rerouting Trayek untuk menata Kembali trayek – trayek</li> <li>7. Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg</li> </ol>
2	Meningkatnya kinerja layanan Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai seperti sapras layanan Uji KIR</li> <li>2. Layanan terminal belum optimal</li> <li>3. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam layanan perhubungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung layanan Uji KIR kurang layak karena sudah lama dan perlu perbaikan</li> <li>2. Sarana parkir layanan Uji KIR belum memadai</li> <li>3. Tenaga penguji terbatas</li> <li>4. Terminal masih dalam tahap BGS</li> <li>5. Teknisi PJU terbatas</li> <li>6. Kendaraan teknis dan operaisonal terbatas dan sudah tua (Derek, crane dan kendaraan operasional lainnya)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya usulan pembebasan lahan dan pembangunan untuk lahan parkir</li> <li>2. Pelayanan Uji Kir Dishub telah mendapat akreditasi A sehingga dapat mendorong peningkatan layanan</li> <li>3. Adanya koordinasi antara timwas BGS terminal dan pihak terkait lainnya</li> <li>4. Tersedianya anggaran untuk pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Layanan PJU belum optimal</li> <li>5. Ketersediaan Anggaran yang terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Belum ada pembangunan aplikasi layanan dan pegawai terbiasa bekerja secara manual</li> <li>8. Pagu anggaran 50% untuk pembayaran listrik PJU dan gaji Non ASN sehingga anggaran untuk kegiatan sangat minim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Adanyad dana kelurahan yang dialokasikan untuk pengadaan PJJ</li> <li>6. Adanya bantuan anggaran dari provinsi dan pusat untuk pengadaan PJU</li> <li>7. Tersedianya anggaran untuk penyediaan crane PJU</li> <li>8. Berkoordinasi dan mengusulkan penambahan anggaran ke TAPD</li> <li>9. Menerapkan ISO di unit layanan</li> </ol>
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keselamatan transportasi</li> <li>2. Meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam berlalu lintas, kebutuhan rambu dan marka belum terpenuhi di semua ruas jalan, layanan PJU belum optimal</li> <li>2. Kurangnya SDM di bidang transportasi, minimnya keikutsertaan diklat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran berlalu lintas masih minim, anggaran terbatas untuk rambu dan marka, masih banyak titik black spot yang belum tertangani, anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan PJU terbatas, gap antara kebutuhan PJU dan realisasinya masih tinggi</li> <li>2. Minimnya lulusan di bidang transportasi di Dishub Depok, anggaran dan waktu yang terbatas untuk keikutsertaan diklat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap tahun rutin dianggarkan untuk perlengkapan jalan walaupun belum maksimal</li> <li>2. Adanya bantuan dari Propinsi Jawa Barat dan Kemenhub untuk perlengkapan jalan</li> <li>3. Adanya sosialisasi tertib lalu lintas serta penertiban parkir liar dan angkutan umum</li> <li>4. Adanya kegiatan ramp check di waktu tertentu seperti lebaran, natal dan tahun baru</li> <li>5. Pengusulan formasi pegawai ke BKPSDM</li> </ol>
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum</li> <li>2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian</li> <li>3. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi</li> <li>2. Penatausahaan administrasi dan keuangan belum optimal</li> <li>3. Belum optimalnya pelaksanaan <i>good governance</i></li> <li>4. Aparatur belum sepenuhnya paham target kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai hanya menjalankan tugas sebagai rutinitas, kurang inisiatif untuk mengembangkan berbagai usulan kebijakan</li> <li>2. kurang pemahnyanya bendahara dalam administrasi keuangan</li> <li>3. penatausahaan asset masih dilakukan secara manual, belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai adanya pembaharuan peraturan dan kebijakan di Dishub Kota Depok</li> <li>2. Adanya Dewan Transportasi Kota yang dapat merumuskan kebijakan – kebijakan baru</li> <li>3. Adanya review secara kontinyu atas dokumen perencanaan dan monev</li> <li>4. Adanya aplikasi SIEP untuk monev capaian kinerja</li> <li>5. LHE Sakip memperoleh nilai BB</li> <li>6. Adanya rencana pembuatan aplikasi asset</li> <li>7. Briefing rutin untuk seluruh bendahara oleh Sekretaris Dinas</li> </ol>

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan

Dalam visi misi Kota Depok, ada dua misi yang menjadi acuan Dinas perhubungan yaitu :

**Tabel 3.2 Visi dan Misi Yang Diemban Dinas Perhubungan**

<b>VISI</b>	<b>MISI</b>
<b>VISI: DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Misi 1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan</li><li>• Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif</li></ul>

Dalam mencapai misi misi tersebut, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN 2025</b>
Terwujudnya layanan transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalanyang berkeselamatan dan berkelanjutan	V/C RATIO	0,70
Terlaksananya akuntabilitas dan pengawasan kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintah yang Profesional	NILAI SAKIP	71,5

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Depok yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program. Berdasarkan hasil evaluasi dan review Bappeda Kota Depok serta memenuhi kebutuhan anggaran di Dinas Perhubungan, perlu ditambah 1 program yaitu Program Pengelolaan Perkeretaapian. Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam rencana kerja Tahun 2025 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai melalui 3 program, 18 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Program yang dijalankan yaitu :

- a) **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- b) **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**
- c) **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**

Arah kebijakan dan fokus kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut :

<b>VISI : KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA</b>			
<b>MISI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Terwujudnya layanan transportasi yang berkeselamatan	Meningkatnya Kinerja Ruas Jalan yang Berkeselamatan	1. Optimalisasi manajemen lalu lintas (penanganan kemacetan, penataan persimpangan) untuk mewujudkan Depok Tertib dan Aman Berlalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penataan infrastruktur jalan dan simpang dengan berkoordinasi dan merumuskan perencanaan secara terpadu dengan OPD terkait.</li> <li>2. Pemenuhan marka dan rambu di semua ruas jalan.</li> <li>3. Sinergi kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dengan kebijakan pembukaan jalan tol.</li> <li>4. Peningkatan kinerja ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas.</li> <li>5. Penyediaan layanan patroli dan pengawasan lalu lintas.</li> <li>6. Penataan black spot/blank spot/trouble spot sebagai upaya meningkatkan ruas jalan yang aman dan selamat.</li> <li>7. Peningkatan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu lintas (ITS da ATCS).</li> <li>8. Peningkatan kesadaran tertib lalu lintas melalui sosialisasi tertib lalu lintas.</li> </ol>

			9. Peningkatan kualitas layanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor (layanan online)
	Meningkatnya Layanan Transportasi Publik yang Berkelanjutan	2. Mengembangkan system transportasi public yang terintegrasi untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan layanan angkutan umum</li> <li>2. Optimalisasi rencana angkutan umum massal</li> <li>3. Peningkatan layanan terminal</li> <li>4. Peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor</li> <li>5. Pengembangan/penataan jaringan trayek</li> <li>6. Penyediaan layanan angkutan feeder</li> <li>7. Pengembangan dan penyediaan halte dan shelter</li> <li>8. Penyediaan fasilitas park and ride</li> <li>9. Peningkatan dan pengembangan simpul transportasi</li> <li>10. Penyusunan review masterplan transportasi</li> <li>11. Penyusunan kajian teknis angkutan massal</li> <li>12. Penyusunan rencana induk perkeretaapian</li> <li>13. Pengusulan subsidi untuk pengembangan angkutan umum</li> </ol>
	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kuantitas, kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui keikutsertaan Pendidikan dan pelatihan</li> <li>2. Peningkatan penyediaan sarana prasarana perkantoran</li> <li>3. Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk menunjang layanan Dinas Perhubungan.</li> </ol>

Uraian rencana program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun**  
**2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Depok**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)			
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET				
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>													
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							Rp 108,638,488,176.00				Rp 114,435,131,564.00		
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>							Rp 108,638,488,176.00				Rp 114,435,131,564.00		
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							Rp 23,692,750,096.00				Rp 32,551,992,500.00		
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Rp 199,007,300.00				Rp 220,000,000.00		
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	3 Dokumen	100 persen	Rp 149,393,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 150,000,000.00
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	17 Laporan	100 persen	Rp 49,614,300.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	Rp 70,000,000.00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	125 orang	100 persen	Rp 20,207,354,096.00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 orang	Rp 28,628,480,000.00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026				
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)		
									PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET			
2	15	01	2.05	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
						Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	7 Laporan	100 persen	Rp 40,000,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	Rp 44,000,000.00		
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Rp 175,000,000.00			Rp 82,500,000.00		
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya												
						Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	100%	1 Paket	100 persen	Rp 75,000,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp 82,500,000.00		
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan												
						Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	100%	120 Orang	100 persen	Rp 100,000,000.00	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan	120 Orang	Rp 110,000,000.00		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							Rp 960,000,000.00			Rp 1,056,000,000.00		
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	100%	1 Paket	100 persen	Rp 10,000,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	Rp 11,000,000.00		
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	100%	2 Paket	100 persen	Rp 220,000,000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 242,000,000.00		
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	100%	1 Paket	100 persen	Rp 10,000,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 11,000,000.00		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN					INDIKATOR KINERJA			RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
						CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
									PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET	
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	7 Laporan	100 persen	Rp 38,646,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	Rp 40,000,000.00	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp 97,700,000.00			Rp 100,000,000.00		
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	1 Paket	100 persen	Rp 97,700,000.00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp 100,000,000.00	
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan										
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	120 Orang	100 persen	Rp -	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan	120 Orang	Rp -	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp 1,219,862,700.00			Rp 1,566,627,500.00		
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	100%	1 Paket	100 persen	Rp 9,974,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	Rp 30,000,000.00	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	100%	6 Paket	100 persen	Rp 321,239,200.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 363,000,000.00	
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	100%	1 Paket	100 persen	Rp 29,837,000.00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 36,602,500.00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)			
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET				
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	100%	3 Paket	100 persen	Rp 329,996,000.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 500,000,000.00
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	100%	1 Paket	100 persen	Rp 19,945,500.00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 150,000,000.00
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penyediaan administrasi umum perkantoran	100%	150 Laporan	100 persen	Rp 508,871,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Rp 487,025,000.00
2	15	01	2.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp	-		Rp	-
2	15	01	2.08	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Persentase terpenuhi ya jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	100%	1 unit	100 persen	Rp -	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	Rp -
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp	1,355,640,000.00		Rp	1,537,296,000.00
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhi ya jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	100%	12 Laporan	100 persen	Rp 625,100,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 570,990,000.00
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhi ya jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	100%	12 Laporan	100 persen	Rp 730,540,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 966,306,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN				INDIKATOR KINERJA			RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
					CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)		
								PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET			
2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp	574,540,000.00			Rp	459,589,000.00			
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas											
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	60 unit	100 persen	Rp	149,860,000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 unit	Rp	204,974,000.00
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	35 unit	100 persen	Rp	34,790,000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	Rp	35,000,000.00
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
					Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	persentase barang milik daerah kondisi baik	100%	3 unit	100 persen	Rp	389,890,000.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Rp	219,615,000.00
2	15	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				Rp	<b>84,870,738,080.00</b>				Rp	<b>81,783,139,064.00</b>			
2	15	02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				Rp	425,000,000.00			Rp	400,000,000.00			
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	cakupan integrasi perencanaan transportasi	27 km/jam	5 dokumen	100 persen	Rp	425,000,000.00	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 dokumen	Rp	400,000,000.00
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				Rp	6,658,989,300.00			Rp	11,150,000,000.00			
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan	27 km/jam	2 unit	11.11%	Rp	31,760,000.00	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	Rp	5,000,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)			
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET				
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan	27 km/jam	250 unit	11.11%	Rp 3,999,566,300.00	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	250 unit	Rp 3,400,000,000.00
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan	27 km/jam	10 unit	11.11%	Rp 143,475,000.00	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10 unit	Rp 250,000,000.00
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan	27 km/jam	100 unit	11.11%	Rp 2,484,188,000.00	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 unit	Rp 2,500,000,000.00
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			Rp 274,980,000.00			Rp 500,000,000.00			
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase rekomendasi parkir yang dikeluarkan	27 km/jam	10 Laporan	100 persen	Rp 274,980,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	Rp 500,000,000.00
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Rp 12,698,321,000.00			Rp 16,400,000,000.00			
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase titik pengawasan kemacetan	27 km/jam	12 Laporan	46.15 persen	Rp 12,637,101,000.00	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 16,000,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)			
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET				
2	15	02	2.06	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase titik pengawasan kemacetan	27 km/jam	11 Laporan	46.15 persen	Rp 61,220,000.00	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11 Laporan	Rp 400,000,000.00
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				Rp 29,986,000.00		Rp 125,000,000.00			
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase Andalalin yang diterbitkan	27 km/jam	12 Laporan	100%	Rp 29,986,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	Rp 125,000,000.00
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp 1,640,000,000.00		Rp 1,140,000,000.00			
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	load factor	27 km/jam	12 Laporan	32%	Rp 400,000,000.00	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	Rp 140,000,000.00
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	load factor	27 km/jam	3500 unit	32%	Rp 1,240,000,000.00	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3500 unit	Rp 1,000,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN				INDIKATOR KINERJA			RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
					CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)		
								PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET			
2	15	02	2.14							Rp	525,440,000.00			Rp	345,000,000.00	
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota											
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	rasio ijin trayek	27 km/jam	2 Laporan	0.0023	Rp	350,440,000.00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Rp	170,000,000.00
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	rasio ijin trayek	27 km/jam	12 Laporan	0.0023	Rp	175,000,000.00	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	Rp	175,000,000.00
2	15	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>						Rp	<b>75,000,000.00</b>			Rp	<b>100,000,000.00</b>
2	15	05	2.10		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian						Rp	75,000,000.00			Rp	100,000,000.00
2	15	05	2.10	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian											
					persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian	100%	1 Dokumen	100%	Rp	75,000,000.00	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	Rp	100,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)			
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET				
	<b>Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal</b>								Rp 4,339,260,000.00			Rp 5,200,000,000.00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp 4,339,260,000.00			Rp 5,200,000,000.00		
2	15								Rp 4,339,260,000.00			Rp 5,200,000,000.00		
2	15	02							Rp 4,339,260,000.00			Rp 5,200,000,000.00		
2	15	02	2.03						Rp 4,339,260,000.00			Rp 5,200,000,000.00		
2	15	02	2.03	0011										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara	jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun	27 km/jam	1 unit	6.000.000 orang	Rp 4,339,260,000.00	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara	1 unit	Rp 5,200,000,000.00
	<b>Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum</b>								Rp 56,415,681,500.00			Rp 43,887,987,813.00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp 56,415,681,500.00			Rp 43,887,987,813.00		
2	15								Rp 56,415,681,500.00			Rp 43,887,987,813.00		
2	15	02							Rp 56,415,681,500.00			Rp 43,887,987,813.00		
2	15	02	2.02						Rp 56,415,681,500.00			Rp 43,887,987,813.00		
2	15	02	2.02	0002										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	27 km/jam	600 unit	3,88%	Rp 7,345,103,500.00	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	600 unit	Rp 41,387,987,813.00
2	15	02	2.02	0004										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	persentase ketersediaan perlengkapan jalan	27 km/jam	5800 unit	3,88%	Rp 49,070,578,000.00	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5800 unit	Rp 2,500,000,000.00
	<b>Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor</b>								Rp 1,863,080,280.00			Rp 2,635,151,251.00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								Rp 1,863,080,280.00			Rp 2,635,151,251.00		
2	15								Rp 1,863,080,280.00			Rp 2,635,151,251.00		
2	15	02							Rp 1,863,080,280.00			Rp 2,635,151,251.00		
2	15	02	2.05						Rp 1,863,080,280.00			Rp 2,635,151,251.00		
2	15	02	2.05	0001										
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	27 km/jam	19 unit	95%	Rp 123,851,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	19 unit	Rp 300,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026					
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)			
					PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		TOLAK UKUR	TARGET				
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	27 km/jam	14000 dokumen	95%	Rp 449,995,000.00	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14000 dokumen	Rp 668,528,438.00
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	27 km/jam	11 unit	95%	Rp 150,000,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 unit	Rp 97,240,000.00
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	27 km/jam	12 Laporan	95%	Rp 989,234,280.00	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	Rp 1,519,382,813.00
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
					Kecepatan rata-rata	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	27 km/jam	1 laporan	95%	Rp 150,000,000.00	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 laporan	Rp 50,000,000.00

## **BAB V PENUTUP**

Bahwa tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Depok harus dapat mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran penyelenggaraan.

Upaya untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan perhubungan dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas Perhubungan yang dibarengi dengan semangat kebersamaan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Depok dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan.

Untuk itu diperlukan suatu penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 untuk memberikan gambaran tentang rencana Kerja Dinas Perhubungan 1 (satu) tahun kedepan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun program kerja yang selar as dengan arah kebijakan pemerintah Kota Depok serta digunakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Depok dalam menyelenggarakan jasa transportasi sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk Mewujudkan **DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA**.

Namun demikian terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok, pelaksanaan program / kegiatan dan pencapaian visi misi Daerah tetap menjadi prioritas utama bagi Dinas Perhubungan Kota Depok. Dalam pelaksanaan kegiatan tentu akan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku demikian pula dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok yang senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat banyak pada umumnya dan pengguna jasa transportasi pada khususnya.

Sebagai catatan penting bahwa upaya Dinas Perhubungan Kota Depok dalam mengatasi semua permasalahan terkait tugas pokok dan fungsinya, maka sebagai rencana tindak lanjut akan tetap berkoordinasi dengan semua stake holder terkait dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk dapat mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Depok.

  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA DEPOK  
**Drs. ZAMROWI, M.Si**  
NIP. 1966 0607 1986 10 1 005